

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat sering kali menganggap penyandang disabilitas sebagai individu yang cacat dan dianggap tidak mampu berkontribusi atau menghasilkan sesuatu dalam kehidupannya. Sering kali mereka dianggap tidak mampu melaksanakan peran dan menjalankan tanggung jawab secara optimal, sehingga hak mereka kerap terabaikan dan tidak dipenuhi sebagaimana mestinya (Allo, 2022). Faktanya, penyandang disabilitas termasuk dalam elemen penting masyarakat, memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang setara dengan warga negara lainnya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mencari nafkah (Sudawarti, 2016).

Laporan Survei Global (2023) mengenai penyandang disabilitas mengatakan, sekitar 16% dari populasi global merupakan individu dengan disabilitas, dimana 80% di antaranya menetap di wilayah selatan dunia. Dengan kata lain, terdapat sekitar 1,3 miliar orang di seluruh dunia sebagai penyandang disabilitas. Namun, penyandang disabilitas kerap mengalami berbagai kendala dalam mengakses peluang kerja secara adil. Faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur, sikap diskriminatif, serta rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan menjadi tantangan utama yang membatasi partisipasi mereka di dunia kerja (Mawarningsih & Trustisari 2024).

Penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi beragam tantangan sosial dan ekonomi yang kompleks, seperti terbatasnya akses terhadap pendidikan, informasi, pekerjaan, layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Di

Indonesia, jumlah penyandang disabilitas diperkirakan mencapai 22,97 juta orang atau sekitar 8,5% dari keseluruhan populasi, dengan mayoritas berasal dari kelompok usia lanjut (Kemenko PMK, 2023). Selain itu, jumlah penduduk penyandang disabilitas yang termasuk dalam kategori usia kerja tercatat sebanyak 5,17 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 1,04 juta orang yang tergolong sebagai angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penyandang disabilitas masih tergolong rendah, yaitu sebesar 20,24%, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kalangan disabilitas mencapai 10,8% (Kemnaker, 2024).

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sekitar 22,5 juta, yang setara dengan sekitar 5% dari total penduduk. Namun, jumlah tersebut meningkat pada tahun 2023 menjadi 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari populasi nasional, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK, 2023).

Memperoleh kehidupan yang layak dan perlindungan sosial merupakan hak dasar bagi penyandang disabilitas. Di Indonesia, pemerintah telah menjalankan berbagai program guna memperkuat perlindungan sosial dengan tujuan memberikan jaminan serta meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Upaya ini meliputi penyediaan layanan sosial dasar hingga pelaksanaan berbagai program pemberdayaan (Kemensos, 2024).

Indonesia berkomitmen dalam menjamin hak hak penyandang disabilitas melalui penciptaan lingkungan fisik dan sosial yang inklusif. Pada 30 Maret 2007 di New York, Indonesia turut menandatangani *Convention on the Rights of Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Sebagai bentuk tindak

lanjut, pemerintah mengesahkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan berbagai program dan kebijakan untuk menjamin pemenuhan hak hak mereka.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, individu dengan disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Disabilitas diklasifikasikan ke dalam empat jenis, yaitu disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Walaupun telah terdapat berbagai kebijakan dan upaya perlindungan bagi penyandang disabilitas, diskriminasi terhadap mereka masih kerap terjadi.

Tabel 1. 1
Jumlah Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan Penyandang
Disabilitas di Indonesia 2023

No.	Nama Data	Jumlah
1.	DI Yogyakarta	26
2.	DKI Jakarta	16
3.	Jawa Barat	14
4.	Kalimantan Selatan	7
5.	Jawa Timur	7
6.	Jawa Tengah	6
7.	Sulawesi Selatan	3
8.	Sumatera Utara	3
9.	Riau	2
10.	Kep. Riau	2
11.	Maluku	1
12.	Kalimantan Timur	1
13.	Lampung	1
14.	Sumatera Selatan	1
15.	Sulawesi Tenggara	1
16.	Kalimantan Barat	1
17.	Aceh	1
18.	Tidak Teridentifikasi	12
Total		105 orang

Sumber: Komnas Perempuan, 2023

Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mencatat terdapat 105 kasus kekerasan berbasis gender yang menimpa perempuan penyandang disabilitas. Dari jumlah tersebut, 40 kasus dialami oleh penyandang disabilitas mental, 33 oleh disabilitas sensorik, 20 oleh disabilitas intelektual, dan 12 kasus melibatkan penyandang disabilitas fisik (Muhamad, 2024). Sedangkan berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang terdapat 4 jumlah korban kekerasan penyandang disabilitas menurut kelompok usia anak pada tahun 2024.

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, ekonomi dan pendidikan. Sebagai salah

satu kota metropolitan, jumlah penduduknya terus meningkat setiap tahun. Peningkatan ini didorong oleh tingginya mobilitas penduduk, proses urbanisasi, serta kemajuan sektor industri dan jasa yang menjadi daya tarik migrasi dari wilayah lain (PPID Kota Semarang, 2024).

Tabel 1. 2
Jumlah Penduduk Kota Semarang
2020-2024

No.	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	2020	818.441	835.083	1.653.524
2.	2021	819.785	836.779	1.656.564
3.	2022	821.305	838.670	1.659.975
4.	2023	838.437	856.306	1.694.743
5.	2024	845.177	863.656	1.708.833

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Jumlah penduduk kota Semarang mengalami peningkatan setiap tahun dari 2020 hingga 2024. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk Kota Semarang mencapai 1.708.833 jiwa, yang terdiri atas 845.177 jiwa laki laki dan 863.656 jiwa perempuan. Jika dilihat dari persentasenya, penduduk laki laki menyumbang sekitar 49,45%, sedangkan perempuan sebesar 50,55%. Data ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan melebihi jumlah laki laki di Kota Semarang.

Jumlah penyandang disabilitas di Kota Semarang meningkat pada tahun 2023. Situasi ini membuat banyak penyandang disabilitas hidup dalam kondisi ekonomi dan sosial yang kurang memadai. Akibat berbagai hambatan tersebut, penyandang disabilitas sering kesulitan memenuhi standar sosial yang berlaku, sehingga mengalami tantangan dalam berpartisipasi aktif di masyarakat maupun dalam memperoleh pekerjaan (Perdinan et al., 2023).

Tabel 1. 3

Jumlah Penyandang Disabilitas menurut Kecamatan di Kota Semarang

Kecamatan	2022	2023
Gayamsari	95	94
Tugu	24	25
Semarang Timur	133	133
Gajah Mungkur	109	111
Semarang Utara	133	136
Tembalang	306	307
Semarang Selatan	107	103
Mijen	85	91
Semarang Barat	185	202
Gunung Pati	92	97
Genuk	132	132
Candisari	111	108
Ngaliyan	277	294
Banyumanik	213	211
Pedurungan	309	318
Semarang Tengah	110	104
Jumlah	2.421	2.466

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Jumlah penyandang disabilitas menurut kecamatan di Kota Semarang pada tahun 2022 dan 2023. Secara keseluruhan, terdapat peningkatan jumlah penyandang disabilitas dari 2.421 jiwa pada tahun 2022 menjadi 2.466 jiwa pada tahun 2023.

Kota Semarang telah menetapkan kebijakan mengenai pendidikan inklusif melalui Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2020. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Jumlah SLB yang tersedia masih belum sebanding dengan kebutuhan penyandang disabilitas usia sekolah, sehingga menyulitkan mereka untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak (Putra et al. 2024).

Tabel 1. 4
Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) dibawah KEMENDIKBUDRISTEK Kota Semarang
2021-2023

Tahun	Jumlah SLB di Kota Semarang		Jumlah
	Negeri	Swasta	
2021	1	15	16
2022	1	15	16
2023	1	14	15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Tahun 2021 menurut data dari BPS Kota Semarang dan 2022 tercatat masing masing terdapat 16 Sekolah Luar Biasa (SLB), sementara pada tahun 2023 jumlahnya menurun menjadi 15 SLB. Terbatasnya jumlah SLB ini menyebabkan hanya sebagian kecil penyandang disabilitas yang mampu memperoleh akses pendidikan secara layak.

Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 mengenai Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 72 ayat (3), disebutkan bahwa pemberdayaan sosial dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain: asesmen oleh pekerja sosial profesional, proses diagnosis, pemberian motivasi, pelatihan, pendampingan, pemberian intensif, peningkatan akses pemasaran produk usaha, hingga penyediaan bimbingan lanjutan.

Salah satu strategi penting dalam mengatasi persoalan tersebut adalah melalui program pemberdayaan yang berbasis komunitas. Pemberdayaan adalah upaya untuk memperkuat posisi penyandang disabilitas dengan mendorong pertumbuhan dan pengembangan potensi yang mereka miliki, agar mereka mampu menjadi individu atau kelompok yang mandiri dan tangguh. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan dan

peningkatan akses terhadap kesempatan ekonomi menjadi sangat krusial. Kegiatan ataupun program yang dilaksanakan di KSD sangat beragam seperti calistung, pendalaman rohani, pelatihan bahasa *inggris*, kelas *public speaking*, pembuatan bandeng presto, pelatihan literasi digital, pelatihan menjahit dan menyulam, pelatihan fotografi, penulisan kreatif, bending triplek dan hidroponik. Salah satu bentuk pemberdayaan yang menjanjikan adalah pelatihan menyulam. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang teknik menyulam dan meningkatkan keterampilan dalam membuat produk sulaman yang dapat dijadikan sebagai sumber wirausaha (Aldiansyah et al., 2023). Aktivitas ini tidak hanya membutuhkan modal kecil dan dapat dilakukan di ruang terbatas, tetapi juga mampu memberikan penghasilan tambahan melalui penjualan produk hasil sulaman sebagai kerajinan tangan yang bernilai tinggi serta melatih konsentrasi, kreativitas dan ketelitian yang membantu meningkatkan rasa percaya diri penyandang disabilitas.

Pemberdayaan merupakan langkah strategis untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik, dengan tujuan menjadikan penyandang disabilitas yang sebelumnya kurang berdaya menjadi pribadi yang mandiri melalui pengembangan potensi dan keterampilan secara maksimal, sehingga kualitas hidup mereka dapat meningkat. Salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan program pemberdayaan ini adalah pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk menggali potensi, meningkatkan kreativitas, memperkuat kemampuan, serta membangun kemandirian. Di Kota Semarang, Komunitas Sahabat Difabel menjadi salah satu

tempat yang memfasilitasi proses tersebut bagi penyandang disabilitas (Setyani, 2022).

Tabel 1.5 Perbandingan Komunitas Sahabat Difabel dengan Komunitas Penyandang Disabilitas Lain di Kota Semarang

Aspek	Komunitas Sahabat Difabel	Komunitas Sahabat Mata Semarang	Komunitas Difabel Mandiri
Jenis Disabilitas yang Dilayani	Penyandang disabilitas umum	Khusus disabilitas netra (tunanetra)	Penyandang disabilitas pelaku usaha (UMKM)
Fokus Kegiatan	Kegiatan sosial, inklusi sosial, bakti sosia.	Pemberdayaan tunanetra, program inklusi sosial, radio komunitas edukasi	Pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, pemasaran produk
Keanggotaan	Terbuka bagi penyandang disabilitas secara umum	Terbatas pada penyandang disabilitas netra	Anggota penyandang disabilitas yang berwirausaha

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Pemilihan Komunitas Sahabat Difabel (KSD) sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan komprehensif dibandingkan dengan komunitas penyandang disabilitas lainnya di Kota Semarang. Jika dibandingkan dengan Komunitas Sahabat Mata Semarang yang secara spesifik melayani penyandang disabilitas netra (tunanetra) serta memiliki fokus pada program inklusi sosial dan edukasi melalui radio komunitas, KSD justru melayani penyandang disabilitas secara umum dengan latar belakang yang lebih beragam. Sementara itu, Komunitas Difabel Mandiri lebih berorientasi pada pengembangan usaha melalui pelatihan kewirausahaan dan pendampingan UMKM. Di sisi lain, KSD menonjol dalam pelaksanaan kegiatan sosial, inklusi sosial, dan bakti sosial yang terintegrasi, termasuk pelatihan keterampilan menyulam yang tidak hanya membangun kompetensi teknis tetapi juga memperkuat rasa percaya diri dan partisipasi sosial

anggotanya. Oleh karena itu, KSD dianggap paling sesuai untuk dijadikan tempat penelitian untuk mengkaji proses pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan seperti menyulam.

Komunitas Sahabat Difabel (KSD) berfungsi sebagai tempat yang berperan dalam mendorong, menggali dan mengembangkan potensi penyandang disabilitas, sekaligus menyediakan fasilitas pendukung bagi mereka. Komunitas ini terbuka bagi seluruh jenis disabilitas, baik disabilitas fisik, sensorik, intelektual maupun mental. Keterbukaan ini menjadi kekuatan tersendiri bagi KSD dalam menciptakan ruang pemberdayaan yang menyeluruh dan beragam yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing masing anggotanya. KSD menjadi ruang bagi para difabel untuk saling berbagi informasi, menjalin relasi, serta tempat berkumpul guna bertukar ide, saling menginspirasi, berkreasi, dan mengekspresikan karya serta pengalaman antar sesama penyandang disabilitas (Setyani, 2022). Komunitas Sahabat Difabel menyediakan ruang bagi para penyandang disabilitas untuk saling menginspirasi, berbagi solusi, serta menyalurkan pengetahuan dan keterampilan kepada sesama difabel, guna mendorong partisipasi mereka dalam proses pembangunan (Listyani et al. 2024).

Pengamatan yang telah dilakukan pada saat survey pra penelitian, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan program pelatihan ini. Keberagaman jenis disabilitas menjadi hambatan tersendiri bagi pihak pengelola dalam menyelenggarakan pelatihan yang efektif. Setiap anggota disabilitas memiliki kebutuhan yang sangat individual, sehingga sulit merancang program yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan tersebut secara menyeluruh. Selain itu, kesulitan

anggota disabilitas dalam mengingat materi juga menjadi tantangan tambahan dalam proses belajar-mengajar. Sedangkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Setyani 2022), hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan disabilitas di KSD termasuk kurangnya dukungan dari orang tua, ketidakaaktifan anggota, kegiatan yang terbatas pada komunitas dan sifat emosional penyandang disabilitas. Dengan demikian, studi ini dimaksudkan untuk menelusuri lebih jauh pelaksanaan pelatihan menyulam di Komunitas Sahabat Difabel Kota Semarang, serta mengidentifikasi faktor faktor penghambat yang dihadapi dalam proses pemberdayaan tersebut. Penelitian ini akan menggunakan teori 5P dari Edi Suharto yang mencakup aspek pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan.

Pelatihan menyulam bagi anggota difabel Komunitas Sahabat Difabel Kota Semarang bertujuan untuk membekali mereka dengan keterampilan yang berpotensi menjadi sumber penghasilan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup serta kemandirian secara ekonomi. Selain itu, program ini diharapkan dapat membantu mengubah pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas, dengan menunjukkan bahwa mereka juga memiliki kemampuan dan potensi yang setara untuk berperan dan memberikan kontribusi di berbagai sektor.

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat guna dalam mengoptimalkan program pelatihan menyulam, sehingga manfaatnya bagi penyandang disabilitas dapat semakin maksimal. Dengan begitu, pemberdayaan melalui pelatihan menyulam tidak hanya bertujuan meningkatkan

kesejahteraan mereka, tetapi juga diharapkan turut mendorong terciptanya masyarakat Kota Semarang yang lebih inklusif dan adil.

Dari uraian masalah di atas, kegiatan pelatihan menyulam yang diselenggarakan oleh Komunitas Sahabat Difabel merupakan upaya pemberdayaan yang patut dikaji lebih dalam. Selain memberikan pelatihan teknis, program ini juga berfungsi sebagai wadah untuk memperkuat rasa percaya diri, kemandirian dan nilai ekonomi para penyandang disabilitas. Namun, proses pemberdayaan tidak selalu berjalan mulus. Diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana proses pemberdayaan berlangsung serta berbagai hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan kegiatan. Hal ini mendorong munculnya pertanyaan penelitian: ***“Bagaimana proses pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelatihan menyulam di Komunitas Sahabat Difabel Kota Semarang?”***

1.2 Identifikasi Masalah

Penjelasan pada bagian latar belakang menunjukkan adanya sejumlah inti permasalahan yang mendasari pelaksanaan penelitian ini, yaitu:

1. Jumlah penyandang disabilitas di Kota Semarang yang menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam hal pemberdayaan agar mereka bisa hidup mandiri dan produktif.
2. Minimnya jumlah Sekolah Luar Biasa yang tersedia yang menjadi kendala bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
3. Stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Masih adanya pandangan negatif dari masyarakat terhadap penyandang disabilitas, seperti

dianggap tidak mampu bekerja atau berkontribusi yang berdampak pada kepercayaan diri dan kesempatan mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

1.3 Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelatihan menyulam di Komunitas Sahabat Difabel Kota Semarang?
2. Apa saja faktor penghambat pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelatihan menyulam di Komunitas Sahabat Difabel Kota Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk menganalisis proses pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelatihan menyulam di Komunitas Sahabat Difabel Kota Semarang.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelatihan menyulam di Komunitas Sahabat Difabel Kota Semarang.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan signifikan dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam bidang pemberdayaan penyandang disabilitas. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan serta menjadi referensi bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan studi serupa mengenai isu pemberdayaan penyandang disabilitas.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Komunitas Sahabat Difabel

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan dalam upaya mengembangkan program pelatihan yang lebih efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan.

2. Bagi Pemerintah atau Lembaga Sosial

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam menyusun program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas yang berfokus pada pengembangan keterampilan.

3. Bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan atau dasar bagi studi lanjutan.

1.6 Kerangka Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Kusumawati, C. B., & Winarni, F. (2019) berjudul “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Kabupaten Bantul” menggunakan metode deskriptif kualitatif. Studi ini mengungkapkan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas dilakukan dengan lima pendekatan yang dikemukakan oleh Edi Suharto. Hasilnya, penyandang disabilitas berhasil mengembangkan keterampilan kerajinan, meningkatkan taraf hidup, dan mencapai kesejahteraan sosial ekonomi. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengkaji pemberdayaan penyandang disabilitas dengan teori yang sama yaitu teori 5P Edi Suharto tetapi terdapat perbedaan lokus

dan juga kajian, dimana penelitian yang akan dilakukan berfokus pada proses dan faktor penghambat pemberdayaan penyandang disabilitas.

Penelitian oleh Az-Zahra, A., & Hamid, A. (2022) berjudul “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik Melalui Program Keterampilan di Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti Jakarta Barat” menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pemberdayaan di PSBD Budi Bhakti dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu primer dan sekunder. Hasilnya menunjukkan terdapat perubahan positif pada penyandang disabilitas, misalnya perkembangan pola pikir yang lebih terbuka, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, terciptanya kemampuan untuk mandiri serta meningkatnya kualitas hidup mereka. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah menyoroti bagaimana individu dengan disabilitas dapat memperoleh keterampilan dan menjadi lebih mandiri secara sosial maupun ekonomi tetapi terdapat perbedaan lokus dan penelitian ini mengacu pada teori 5P Edi Suharto.

Penelitian oleh Waruwu, D., & Adhi, N. K. J. (2019) berjudul “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Obyek Wisata Kuta Bali” menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini membahas pemberdayaan tunanetra dan tunadaksa di Kuta, dengan bentuk pekerjaan seperti *cleaning service*, tukang masak, operator CCTV, dan penjual pulsa keliling. Namun, penyandang disabilitas masih kurang diberdayakan dan cenderung termarginalkan dalam industri pariwisata. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dapat lebih mendukung mereka agar mendapatkan pekerjaan yang layak. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah kedua penelitian berfokus

pada kelompok penyandang disabilitas sebagai subjek utama yang diberdayakan tetapi terdapat perbedaan lokus dan penelitian sebelumnya berfokus pemberdayaan dalam sektor pariwisata sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pelatihan keterampilan menyulam.

Penelitian oleh Astutik, S., & Nawangsari, E. R. (2023) berjudul “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh Sheltered Workshop Peduli ‘Sambung Roso’ di Desa Simbatan, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan” menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa SWP ‘Sambung Roso’ berhasil memberdayakan penyandang disabilitas di desa tersebut. Penelitian ini berfokus pada teori pemberdayaan masyarakat menurut Dedeh Maryani yang mencakup lima prinsip utama: kesetaraan, partisipasi, kemandirian (keswadayaan) dan keberlanjutan. Berdasarkan hasil penelitian, SWP ‘Sambung Roso’ telah berhasil menjalankan proses pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas di Desa Simbatan, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah kedua penelitian sama sama membahas tentang pemberdayaan penyandang disabilitas dengan tujuan untuk melihat bagaimana komunitas memberikan pelatihan dan dukungan kepada penyandang disabilitas agar mandiri secara sosial dan ekonomi tetapi terdapat perbedaan lokus dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 5P yang dikemukakan oleh Edi Suharto.

Penelitian oleh Setyani, T. (2022) berjudul “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Keterampilan Menjahit di Komunitas Sahabat Difabel Kota Semarang” bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan tersebut

dilakukan serta faktor yang menghambat dan mendukungnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pemberdayaan sudah berjalan baik, memberikan keterampilan, penghasilan, dan meningkatkan rasa percaya diri para penyandang disabilitas. Hambatan yang dihadapi termasuk kurangnya dukungan dari orang tua, ketidakaaktifan anggota, kegiatan yang terbatas pada komunitas dan sifat emosional penyandang disabilitas. Faktor pendukungnya adalah kerja sama, donatur, pelatih dan bazar. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitian sama sama di Komunitas Sahabat Difabel Kota Semarang tetapi terdapat perbedaan jenis keterampilan dimana penelitian ini fokus kegiatannya adalah pelatihan menyulam dan teori yang digunakan dalam kedua penelitian ini juga berbeda.

Penelitian oleh Achmad, W., Chuang, H. M., Gunawan, U. P., Nadila, D., & Maulana, I. (2023) berjudul “*Community Empowerment through the Development of the Cisaat Tourism Village, Subang Regency, Ilomata*” menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat di Desa wisata Cisaat, Kabupaten Subang, Jawa Barat sudah berjalan cukup baik ditandai dengan tercapainya tiga aspek: jangkauan pemberdayaan, tingkat partisipasi masyarakat, dan pengawasan terhadap desa wisata. Namun masih terdapat tantangan seperti kondisi geografis yang rawan bencana, kesenjangan kapasitas sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran lingkungan dikalangan masyarakat. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya mengangkat tema utama tentang pemberdayaan masyarakat, baik kelompok difabel maupun masyarakat umum desa wisata tetapi

terdapat perbedaan lokus dan subjek pada penelitian ini adalah penyandang disabilitas.

Penelitian oleh Chawa, A. F., Putra, M. H., & Purba, D. (2021) berjudul *"Community-based Approach to Empower People with Disabilities"* menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini membahas upaya pemberdayaan penyandang disabilitas dengan pendekatan berbasis komunitas. Penelitian dilakukan di Kampung Cempluk, Malang dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat tentang isu disabilitas dan mendorong keterlibatan mereka dalam merancang kegiatan yang inklusif. Salah satunya adalah penyelenggaraan festival seni dan musik inklusif yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai peserta aktif. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan komunitas mampu menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas dan mendukung partisipasi mereka secara setara. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya sama sama bertujuan untuk memberdayakan penyandang disabilitas melalui pendekatan berbasis komunitas tetapi terdapat perbedaan lokus dan teori yang digunakan juga berbeda, pada penelitian ini menggunakan teori 5P Edi Suharto sedangkan penelitian Anif lebih menekankan pada pendekatan sosial budaya dan partisipatif masyarakat sekitar.

Penelitian oleh Ver Medalla, D., & Medalla, B. M. (2018) berjudul *"Empowering Persons with Disabilities Through Training and Employment"* menggunakan metode kualitatif. Studi ini menganalisis proses pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pengembangan keterampilan dan pemberian kesempatan kerja. Fokus utamanya adalah pada perusahaan sosial *"Handcrafted by*

Harl's” di Filipina, yang menjadi contoh dalam penerapan praktik inklusif bagi penyandang disabilitas. Melalui program pelatihan yang mencakup mentoring, para penyandang disabilitas mampu mengembangkan keterampilan sekaligus meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri mereka. Hasil penelitian menguatkan pandangan bahwa disabilitas bukan semata mata persoalan fisik, tetapi juga merupakan hasil konstruksi sosial yang dapat diatasi melalui pendekatan inklusif. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya sama sama menyoroti upaya pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelatihan keterampilan dan membuka akses terhadap aktivitas produktif tetapi terdapat perbedaan yaitu penelitian yang saya lakukan berfokus pada komunitas lokal di Kota Semarang dengan kegiatan pelatihan menyulam sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat. Sementara itu, penelitian oleh Medalla dilakukan di Filipina dan menggunakan studi kasus terhadap perusahaan sosial “*Handcrafted by Harl's*” sebagai wadah pemberdayaan melalui kerja dan pelatihan berbasis bisnis sosial.

Penelitian oleh Wass, S., & Safari, M. C. (2020) yang berjudul “*Photovoice Towards Engaging and Empowering People with Intellectual Disabilities in Innovation*” menggunakan metode *photovoice* untuk melibatkan penyandang disabilitas intelektual dalam proses inovasi, khususnya dalam pengembangan teknologi bantu di bidang kesehatan. Dengan melibatkan sembilan peserta, mereka menemukan bahwa *photovoice* tidak hanya membantu menggali kebutuhan pengguna secara personal dan kontekstual, tetapi juga mendorong pemberdayaan individu melalui peningkatan rasa percaya diri, kemandirian dan

partisipasi aktif. Metode ini terbukti efektif dalam menjembatani hambatan partisipasi, serta memperkuat posisi penyandang disabilitas sebagai subjek aktif dalam inovasi teknologi yang inklusif. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya sama-sama menekankan pentingnya keterlibatan aktif penyandang disabilitas sebagai subjek dalam proses pemberdayaan tetapi terdapat perbedaan mendasar yaitu dalam penelitian ini sasarannya semua jenis disabilitas yang tergabung dalam komunitas. Sementara itu, penelitian Wass dan Sadari berfokus pada penyandang disabilitas intelektual.

Penelitian oleh Hadi Mogavi, R., Hoffman, J., Deng, C., Du, Y., Haq, E.-U., & Hui, P. (2023) yang berjudul *“Envisioning an Inclusive Metaverse: Student Perspectives on Accessible and Empowering Metaverse-Enabled Learning”* mengkaji pandangan mahasiswa penyandang disabilitas mengenai pendidikan berbasis *metaverse*, dengan fokus pada aksesibilitas dan pemberdayaan. Melalui wawancara dengan 56 mahasiswa di AS dan Hong Kong, ditemukan lima tema utama: pengakuan terhadap keberagaman disabilitas, pemberdayaan untuk menyesuaikan pengalaman belajar, keterlibatan aktif, perlindungan privasi dan keamanan dalam lingkungan *virtual*. Penelitian ini mengusulkan delapan pertimbangan desain untuk pengembang teknologi agar menciptakan pengalaman belajar *metaverse* yang inklusif dan aman bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah kedua penelitian ini memiliki fokus utama yang serupa, yaitu pemberdayaan penyandang disabilitas. Namun terdapat perbedaan lokus dan dimana penelitian yang akan dilakukan tidak bergantung pada teknologi canggih sedangkan dalam penelitian yang dilakukan

oleh Mogavi fokus pada pemberdayaan melalui teknologi *metaverse* yang memungkinkan interaksi dalam dunia *virtual*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan merujuk pada penelitian penelitian sebelumnya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program pelatihan menyulam yang diselenggarakan oleh Komunitas Sahabat Difabel Kota Semarang. Dalam analisisnya, penelitian yang akan dilakukan mengacu pada teori Edi Suharto yang mencakup lima pendekatan, yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, ditemukan adanya tantangan dan keberhasilan dalam proses pemberdayan penyandang disabilitas yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini.

1.6.2 Administrasi Publik

Siagian (dalam Hisamuddin & Andriani, 2022) menjelaskan bahwa administrasi secara umum berasal dari kata bahasa Inggris "administration," yang berarti kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada pertimbangan rasional untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Demikian pula, Dimock & Dimock (1986) mengartikan administrasi sebagai sebuah disiplin ilmu yang mempelajari apa yang diinginkan masyarakat melalui pemerintah dan bagaimana cara mencapainya. Administrasi juga menekankan pentingnya aspek aspek konkret dalam metode dan prosedur manajemen. Sementara itu, Syafi'ie dkk (1999) berpendapat bahwa publik terdiri dari sekelompok orang yang memiliki kesamaan

dalam berpikir, merasakan, berharap, bersikap, dan bertindak sesuai dengan nilai nilai serta norma yang mereka anut.

Administrasi publik merupakan serangkaian aktivitas yang dijalankan guna mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang dimaksud mencakup layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah secara langsung maupun melalui pendanaan terhadap layanan yang diberikan oleh pihak swasta (Rahman, 2017). Chandler & Plano (2004) mengungkapkan bahwa administrasi publik adalah proses pengelolaan dan koordinasi sumber daya serta tenaga kerja publik untuk merancang, melaksanakan, dan mengelola keputusan keputusan terkait kebijakan publik. Sementara itu, David H. Rosenbloom (2005) berpendapat bahwa administrasi publik melibatkan penerapan teori teori serta proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi kebutuhan pemerintah di bidang legislatif, dan eksekutif, dengan tujuan menjalankan fungsi pengaturan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Sedangkan Pasolong (2007) mengemukakan bahwa administrasi publik merupakan kolaborasi antara kelompok atau instansi dalam menjalankan fungsi pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang efisien dan efektif.

Dimock & Dimock (1992:26) membagi administrasi publik menjadi empat komponen utama yaitu:

1. Apa yang dilakukan pemerintahan, ini mencakup pengaruh kebijakan dan tindakan politik, dasar dasar dan wewenang yang dimiliki pemerintah,

lingkungan kerja pemerintah, penetapan tujuan, kebijakan administratif internal dan perencanaan.

2. Bagaimana pemerintah mengatur organisasi, SDM dan pendanaan, ini berkaitan dengan struktur organisasi secara formal.
3. Bagaimana peran administrator dalam mewujudkan kerjasama, aliran informasi dan proses administrasi, ini menekankan pada kepemimpinan, koordinasi, pembagian wewenang, hubungan antara pusat dan bagian, pengawasan, moralitas, hubungan masyarakat dan hal hal terkait lainnya.
4. Bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan dirinya, ini mencakup pengawasan di dalam badan eksekutif serta pengawasan yang lebih penting oleh lembaga legislatif, yudikatif dan badan lainnya.

Keban (2019) menyatakan bahwa cakupan administrasi publik meliputi berbagai aspek, di antaranya kebijakan, organisasi, manajemen, nilai moral dan etika, lingkungan eksternal, serta akuntabilitas.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Thomas Kuhn dalam Keban (2019:40) menjelaskan bahwa paradigma adalah serangkaian pandangan, nilai, metode, prinsip dasar, atau pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diterima dan digunakan bersama oleh komunitas ilmiah pada periode waktu tertentu. Nicholas Henry dalam Keban (2019: 41) mengidentifikasi beberapa paradigma dalam administrasi publik yaitu:

1. Paradigma 1 (1990-1926) dikenal sebagai dikotomi antara politik dan administrasi

Frank J. Goodnow (1990), melalui karyanya "*Politics and Administration*" menjelaskan bahwa politik seharusnya berfokus pada perumusan kebijakan atau perwujudan kehendak rakyat. Sedangkan administrasi bertugas untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Paradigma ini mengimplikasikan bahwa administrasi sebaiknya bersifat netral atau bebas nilai dan diarahkan pada pencapaian efisiensi serta efektivitas dalam birokrasi pemerintahan.

2. Paradigma 2 (1927-1937) dikenal sebagai paradigma prinsip prinsip administrasi

Pendekatan ini, menempatkan penerapan prinsip prinsip dasar administrasi sebagai inti dari administrasi publik. Prinsip prinsip tersebut dirumuskan dalam konsep POSDCORB, yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan staff (*staffing*), pengarahan (*directing*), koordinasi (*coordinating*), pelaporan (*reporting*), dan penganggaran (*budgeting*). Para pendukung paradigma ini meyakini bahwa prinsip prinsip administrasi publik bersifat universal dan bisa diimplementasikan di berbagai jenis organisasi, termasuk dalam lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, paradigma ini lebih menitikberatkan pada prinsip prinsip administrasi daripada tempat atau konteks khusus administrasi publik dijalankan.

3. Paradigma 3 (1950-1970) dikenal sebagai paradigma administrasi negara sebagai bagian dari ilmu politik.

Dalam bukunya "*Elements of Public Administration*" (1946), Morstein-Marx meragukan kemungkinan pemisahan yang tegas antara politik dan administrasi, menganggapnya tidak realistis. Pada masa ini, administrasi publik dipandang

sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan, namun fokusnya menjadi tidak jelas karena kelemahan kelemahan dalam prinsip prinsip administrasi yang ada. Selama periode ini pula, administrasi publik menghadapi krisis identitas, sebab ilmu politik mulai mendominasi dan dianggap sebagai landasan utama dalam studi administrasi publik.

4. Paradigma 4 (1956-1970) melihat administrasi publik sebagai disiplin manajemen.

Administrasi publik dalam paradigma ini mengalami pergeseran menuju ilmu administrasi yang mengadopsi prinsip prinsip manajerial secara ilmiah. Fokus utamanya terletak pada kajian perilaku organisasi, analisis manajemen, serta pemanfaatan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem dan riset operasional. Dari perkembangan ini muncul dua arah utama: berorientasi pada pengembangan ilmu administrasi murni yang berbasis pada psikologi sosial dan yang lainnya pada penyelesaian masalah kebijakan publik kemudian pendekatan ini dianggap dapat diterapkan baik di sektor publik maupun swasta, sehingga batas antara keduanya menjadi tidak jelas.

5. Paradigma 5 (1970-sekarang) memandang administrasi publik sebagai ilmu administrasi yang memiliki fokus dan lokus yang jelas.

Paradigma ini menekankan pada berbagai isu serta kepentingan publik, dengan cakupan yang mencakup teori organisasi, manajemen dan kebijakan publik.

6. Paradigma 6 (1990-sekarang) dikenal dengan istilah *governance* atau pemerintahan.

Paradigma ini mencerminkan pergeseran dari model pemerintahan bersifat hierarkis dan terpusat (*government*) menuju tata kelola yang lebih kolaboratif dan partisipatif. Paradigma ini menekankan pentingnya keterlibatan aktor pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan dalam memberikan pelayanan publik yang optimal.

1.6.4 Manajemen Publik

Henry Simamora (2001) menyatakan bahwa manajemen merupakan proses pemanfaatan sumber daya, baik bahan baku maupun manusia, untuk meraih tujuan yang telah ditentukan. Sementara itu, Overman dalam Keban (2004) menjelaskan bahwa manajemen publik adalah kajian lintas disiplin yang membahas berbagai aspek umum organisasi. Manajemen publik menggabungkan fungsi fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian di satu sisi dengan elemen elemen seperti sumber daya manusia, keuangan, aset fisik, informasi serta aspek politik di sisi lainnya.

Tangkilisan (2005) mengungkapkan bahwa manajemen adalah suatu proses yang bersifat universal, namun perbedaan jenis organisasi dan lingkungan menuntut penerapan strategi manajemen yang beragam. Perbedaan ini terutama terlihat jelas antara organisasi publik dan swasta. Oleh karena itu, pendekatan dalam studi manajemen publik harus dibedakan dari manajemen bisnis atau swasta. Secara umum, kajian manajemen publik lebih berfokus pada persoalan kebijakan yang konkret dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Laurence Lynn dalam (Wijaya & Danar, 2014) mengemukakan bahwa manajemen publik dapat dipahami dari tiga sudut pandang, yakni sebagai seni, ilmu

dan profesi. Dalam konteks seni, Lynn melihat manajemen publik sebagai sebuah kegiatan kreatif yang dilakukan oleh para praktisi dan tidak bisa dipelajari hanya melalui pendekatan kuantitatif. Dengan kata lain, manajemen publik adalah aktivitas yang sangat fleksibel dan bergantung pada situasi serta kondisi tempat kegiatan tersebut dijalankan.

Ketika manajemen publik disebut sebagai ilmu, hal ini menunjukkan bahwa bidang tersebut membutuhkan analisis yang sistematis melalui proses penafsiran dan penjelasan. Sementara itu, jika dipandang sebagai profesi, menurut Lynn manajemen publik melibatkan sekelompok individu yang secara khusus mengabdikan diri untuk mempelajari dan menerapkan ilmu tersebut.

1.6.5 Pembangunan

Mardikanto & Seobianto (2017) menjelaskan bahwa pembangunan adalah serangkaian upaya yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan bangsa, baik dengan memperbaiki kondisi yang kurang memadai maupun menyempurnakan kondisi yang sudah baik. Pembangunan dilakukan secara terencana dan sadar, dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pemerintah bersama masyarakat, atau oleh masyarakat dengan bimbingan pemerintah. Proses ini memanfaatkan teknologi yang relevan untuk memenuhi berbagai kebutuhan serta mengatasi masalah yang ada atau yang mungkin timbul, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh warga negara yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2006) mengemukakan bahwa pembangunan pada dasarnya dapat dipahami sebagai suatu proses perubahan

tingkat kesejahteraan yang berlangsung secara sistematis dan alami. Sedangkan Korten (1997) mengemukakan bahwa era pasca-industri menghadapi situasi yang sangat berbeda dibandingkan dengan era industri, sehingga dibutuhkan pendekatan baru yang dapat menggali potensi-potensi penting untuk memperkuat pertumbuhan, kesejahteraan manusia, keadilan, serta keberlanjutan pembangunan. Berdasarkan pandangan Korten, kemudian muncul teori pembangunan yang berfokus pada rakyat (*people-centered development*), yang menekankan bahwa tujuan utama pembangunan adalah perbaikan taraf hidup manusia, bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi atau penguatan negara. Teori ini juga dikenal sebagai *Alternative Development Theory*.

Menurut Anwas (2013) dalam bukunya “Pemberdayaan Masyarakat di Era Global” pembangunan didefinisikan sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki kondisi menuju keadaan yang lebih baik. Pembangunan umumnya berkaitan dengan pencapaian dan perbaikan kesejahteraan ekonomi serta melibatkan perubahan dalam cara pemenuhan kebutuhan dan perbaikan kualitas hidup.

1.6.6 Manajemen Pembangunan

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2006), manajemen pembangunan adalah bentuk pengembangan dari konsep manajemen yang diadaptasikan untuk digunakan dalam pengelolaan kegiatan pembangunan. Sedangkan menurut Kartasmita dalam Sahya Anggara (2016), pendekatan yang paling sesuai untuk membahas administrasi dalam konteks pembangunan adalah pendekatan manajerial. Sementara itu, Kartasmita dalam Rakhmat (2013) menyatakan bahwa

meskipun kajian tentang manajemen telah mengalami banyak perkembangan, prinsip dasar dari teori manajemen tetap sama, yakni mencakup tiga aktivitas utama: perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

a. Perencanaan pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen pembangunan. Sebagai bagian dari fungsi manajerial, perencanaan dilakukan secara sadar, sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan pilihan terbaik dari berbagai alternatif guna mencapai tujuan tertentu.

b. Pelaksanaan pembangunan

Pelaksanaan pembangunan mencakup rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dan memungkinkan tersedianya berbagai fasilitas untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan. Dalam pelaksanaannya, aspek kelembagaan dan ideologi perlu diperhatikan.

c. Monitoring dan evaluasi pembangunan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan, kegiatan pemantauan atau monitoring menjadi salah satu elemen penting dalam manajemen pembangunan. Monitoring bertujuan untuk menilai proses dan hasil kegiatan agar tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan perencanaan.

d. Pengawasan pembangunan

Pengawasan berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sektor publik. Fungsi utama dari pengawasan adalah untuk memberikan arahan perbaikan atau koreksi apabila terdapat penyimpangan terhadap tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kegiatan pembangunan.

1.6.7 Administrasi Pembangunan

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2006) menyatakan bahwa konsep administrasi pembangunan merupakan hasil pengembangan dari administrasi negara yang diterapkan dalam proses pengelolaan pembangunan oleh pemerintah. Fred W. Riggs (1986) dalam karyanya yang berjudul “Administrasi Pembangunan” menjelaskan bahwa administrasi pembangunan mengacu pada rangkaian kegiatan yang terstruktur untuk melaksanakan program atau proyek yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pembangunan. Konsep ini tidak hanya mencakup upaya pemerintah dalam merealisasikan program-program yang telah direncanakan untuk membentuk lingkungan fisik, sumber daya manusia, dan aspek kebudayaan tetapi juga mencerminkan usaha untuk meningkatkan kapasitas dalam menjalankan berbagai program tersebut secara efektif.

Menurut Siagian (2007), administrasi pembangunan terdiri dari dua konsep utama: administrasi dan pembangunan. Administrasi dipahami sebagai keseluruhan proses pelaksanaan keputusan yang telah diambil, yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, pembangunan didefinisikan sebagai serangkaian usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mendorong pertumbuhan dan perubahan menuju kemajuan, sebagai bagian dari proses modernisasi dalam konteks pembangunan bangsa.

Bintoro Tjokrohamidjo (1976) menjelaskan bahwa administrasi pembangunan memiliki dua fungsi utama. Fungsi pertama adalah merumuskan kebijakan untuk memperbaiki administrasi negara, yang mencakup aspek

organisasi, kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan sarana administrasi. Fungsi kedua adalah memperbaiki administrasi untuk mendukung penyusunan kebijakan dan program pembangunan serta memastikan pelaksanaannya berjalan efektif.

1.6.8 Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah konsep yang erat kaitannya dengan pemberian kekuasaan. Konsep ini lebih menekankan pada delegasi kekuasaan, pemberian wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat agar mereka dapat mengelola diri mereka sendiri dan lingkungan mereka sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimiliki.

Menurut Wrihatlono dan Dwidjowijoto (2007) dalam bukunya "Manajemen Pemberdayaan" pemberdayaan adalah sebuah proses yang berlangsung secara bertahap, bukan sesuatu yang bersifat instan. Sementara itu, menurut Suharto (2009) pemberdayaan berarti melindungi, membela, dan mendukung pihak yang lemah untuk menghindari persaingan yang tidak adil dan eksploitasi. Pemberdayaan bukan hanya soal memberikan kekuasaan atau wewenang kepada pihak yang lemah, tetapi juga melibatkan proses pendidikan untuk meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat agar mereka dapat berdaya, memiliki daya saing, dan hidup mandiri.

Pemberdayaan dapat difokuskan pada individu maupun komunitas. Pemberdayaan individu adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, keterampilan dan pengalaman seseorang agar memiliki daya saing dan mencapai kemandirian. Individu yang diberdayakan harus mampu memimpin dan mengatur

diri sendiri, berperan aktif dalam pembangunan, serta memiliki kemampuan dan daya saing sesuai dengan potensi dan keinginannya. Sementara itu, pemberdayaan komunitas adalah proses untuk meningkatkan kemampuan suatu komunitas agar dapat mengelola dan mengatur komunitasnya secara mandiri.

Pemberdayaan memiliki beberapa dimensi utama, yaitu (1) pihak yang memberikan kekuasaan kepada mereka yang lemah, (2) pihak yang menerima kekuasaan, dan (3) upaya untuk mengubah perilaku individu yang diberdayakan menuju kemandirian. Tujuan utama pemberdayaan adalah untuk mendorong individu dan masyarakat agar mampu mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih positif, yakni menuju kemandirian dan keberdayaan. Pemberdayaan bertujuan agar sasaran dapat meningkatkan kualitas hidup, menjadi berdaya, memiliki daya saing, dan mandiri.

1.6.9 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2009) salah satu definisi yang sering digunakan untuk menggambarkan pemberdayaan masyarakat adalah peran masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai sebuah usaha untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya agar dapat secara mandiri menyelesaikan persoalan dan mengambil keputusan. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah untuk menciptakan kekuatan dan kemampuan dari lembaga masyarakat agar dapat mengelola dirinya sendiri secara mandiri, sesuai dengan kebutuhan mereka serta siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Mardikanto (2017) juga

menekankan bahwa pengembangan individu atau kelompok dalam konteks pemberdayaan dapat dicapai melalui beberapa upaya tertentu yaitu:

1. Membangun suasana atau lingkungan yang kondusif untuk mendorong berkembangnya potensi masyarakat.
2. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas atau kekuatan yang telah dimiliki oleh individu maupun kelompok setelah dilakukan intervensi.
3. Proses pemberdayaan mencakup peningkatan kapasitas individu dan kelompok sekaligus menanamkan nilai tanggung jawab serta etos kerja.
4. Pemberdayaan harus mampu memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok lemah yang mudah terpinggirkan agar tidak menjadi sasaran penindasan oleh pihak yang lebih berkuasa serta menjamin tidak terjadinya diskriminasi atau dominasi yang merugikan masyarakat lemah.
5. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan.

Suharto (2009) dalam bukunya “Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat” menyatakan bahwa pelaksanaan dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat tercapai melalui penerapan berbagai pendekatan pemberdayaan sebagai berikut:

1. Pemungkinan: menciptakan situasi yang memungkinkan masyarakat mengembangkan potensinya secara maksimal. Proses pemberdayaan perlu membebaskan masyarakat dari hambatan hambatan budaya dan struktural yang menghambat kemajuan mereka.
2. Penguatan: berfokus pada peningkatan kapasitas dan pengetahuan masyarakat agar mampu menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri.

Pemberdayaan hendaknya mendorong pertumbuhan seluruh kemampuan serta rasa percaya diri masyarakat dalam rangka mendukung kemandirian mereka.

3. Perlindungan: bertujuan menjaga masyarakat terutama kelompok rentan agar tidak menjadi korban ketidakadilan dari kelompok yang lebih kuat, sekaligus mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat. Fokus utama pemberdayaan adalah menghapus segala bentuk diskriminasi dan dominasi yang merugikan golongan lemah.
4. Penyokongan: memberikan bantuan, arahan serta dukungan yang dibutuhkan masyarakat untuk menjalankan peran serta tanggung jawabnya dalam kehidupan. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah membantu masyarakat agar tidak semakin terpuruk dan tersingkir.
5. Pemeliharaan: memastikan terciptanya keseimbangan yang berkelanjutan dalam distribusi kekuasaan di tengah masyarakat. Pemberdayaan harus menjamin adanya keharmonisan serta pemerataan kesempatan bagi semua orang untuk berkembang dan berusaha.

Menurut Solomon dalam (Suharto, 2009) ada beberapa hal yang bisa menjadi penghambat proses pemberdayaan yaitu:

1) Penilaian diri yang negatif

Ketidakterdayaan penyandang disabilitas bisa muncul dari adanya pandangan negatif terhadap diri sendiri. Hal ini sering kali dipengaruhi oleh sikap atau penilaian buruk dari orang lain terhadap mereka. Misalnya, penyandang disabilitas tidak percaya diri atau tidak mampu sejak awal karena mereka sudah

dibentuk untuk merasa bahwa mereka berbeda atau kurang berdaya dalam kehidupan bermasyarakat.

2) Interaksi negatif dengan lingkungan

Pengalaman buruk dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar juga dapat menjadi penyebab ketidakberdayaan sekaligus menghambat proses pemberdayaan. Penyandang disabilitas mungkin pernah mengalami penolakan, diskriminasi atau perlakuan tidak adil yang menimbulkan perasaan terpinggirkan. Akibatnya mereka bisa merasa minder, tidak percaya diri, dan enggan ikut serta dalam kegiatan sosial atau organisasi di lingkungan mereka.

3) Hambatan dari lingkungan yang lebih luas

Lingkungan sosial dan kebijakan yang berlaku juga bisa menjadi hambatan besar. Misalnya, kurangnya aksesibilitas, kebijakan yang tidak inklusif atau kurangnya dukungan dari lembaga pemerintah dan masyarakat membuat penyandang disabilitas kesulitan untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan atau pelayanan publik. Situasi ini membuat mereka sulit untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat.

Menurut Mardikanto dan Soebianto (2017), keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu hambatan dalam proses pemberdayaan. Ketersediaan aksesibilitas, mobilitas, dan fasilitas yang memadai sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan potensi masyarakat. Sarana dan prasarana berperan penting dalam mempermudah masyarakat mengakses berbagai sumber daya, memanfaatkan peluang yang ada, meningkatkan kapasitas diri, serta mencapai kesejahteraan secara berkelanjutan.

Makna dan konsep dasar pemberdayaan mengandung sejumlah prinsip utama dalam pelaksanaannya. Menurut Anwas (2013), prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Proses pemberdayaan harus dilakukan secara demokratis, tanpa paksaan dalam bentuk apapun karena paksaan bukan bagian dari semangat pemberdayaan.
2. Program pemberdayaan harus dirancang berdasarkan analisis kebutuhan, tantangan, dan potensi yang ada pada kelompok sasaran. Langkah awalnya adalah membangkitkan kesadaran mereka akan kekuatan serta aspek yang dapat ditingkatkan untuk mencapai kemandirian.
3. Mereka yang menjadi sasaran pemberdayaan harus dilibatkan sebagai pelaku utama, bukan hanya sebagai penerima manfaat.
4. Pemberdayaan juga berarti menggali dan menghidupkan kembali nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang bermanfaat dan bernilai dalam kehidupan masyarakat.
5. Pemberdayaan adalah proses yang butuh waktu, sehingga harus dilakukan secara bertahap dan terus menerus.
6. Pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati dan berkesinambungan, tidak bisa tergesa-gesa.
7. Pemberdayaan perlu menyentuh semua sisi kehidupan masyarakat, tidak hanya fokus pada satu bidang saja.
8. Perempuan, terutama remaja dan ibu muda harus menjadi bagian penting dalam pemberdayaan karena mereka memiliki peran besar dalam memperbaiki kualitas hidup keluarga dan mengurangi kemiskinan.

9. Pemberdayaan bertujuan untuk membiasakan masyarakat agar terus belajar dan menggunakan sumber daya yang ada secara bijak.
10. Dalam pelaksanaannya, keberagaman budaya masyarakat harus dihargai dan dipertimbangkan.
11. Pemberdayaan harus mendorong partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat agar semakin banyak yang terlibat dalam prosesnya.
12. Sasaran pemberdayaan juga perlu didorong untuk memiliki semangat berwirausaha sebagai bekal untuk hidup mandiri.
13. Petugas atau pelaksana pemberdayaan harus memiliki kemampuan yang memadai, terbuka terhadap perubahan dan bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.
14. Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada di lingkungan masyarakat, agar pelaksanaannya lebih efektif dan menyeluruh.

1.6.10 Penyandang Disabilitas

Disabilitas adalah istilah yang umum digunakan untuk mendeskripsikan seseorang dengan hambatan atau keterbatasan dalam melakukan kegiatan tertentu. Secara umum, jenis keterbatasan ini dibagi menjadi beberapa kategori, seperti: gangguan penglihatan (tuna netra), gangguan pendengaran (tuna rungu), keterbatasan fisik (tuna daksa), gangguan kemampuan berpikir atau belajar (tuna grahita), serta kombinasi dari beberapa jenis keterbatasan tersebut (tuna ganda). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan dalam aspek fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka panjang (jangka

waktu paling singkat 6 bulan dan/atau bersifat permanen) yang menyebabkan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi secara penuh dan setara dengan warga lainnya meskipun memiliki hak yang sama. Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas dikelompokkan menjadi lima jenis utama yaitu:

a. Penyandang disabilitas fisik

Adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

b. Penyandang disabilitas intelektual

Adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.

c. Penyandang disabilitas mental

Adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan neurologis yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif. Disabilitas perkembangan neurologis adalah kondisi yang muncul sejak masa kanak-kanak akibat gangguan perkembangan sistem saraf, yang menyebabkan kesulitan dalam kemampuan berpikir, belajar, berbicara, berinteraksi sosial, atau perilaku.

d. Penyandang disabilitas sensorik

Adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas tungu dan atau disabilitas wicara.

e. Penyandang disabilitas ganda atau multi

Adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

Menurut Reefani (2013:17), penyandang disabilitas dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

a. Disabilitas mental

1. Mental tinggi: merujuk pada individu dengan kemampuan intelektual di atas rata rata, yang umumnya dikenal sebagai orang yang berbakat. Mereka tidak hanya cerdas tetapi juga kreatif dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.
2. Mental rendah: menunjukkan individu dengan tingkat kecerdasan (IQ) di bawah rata rata. Kelompok ini terdiri dari dua kategori, yaitu anak dengan keterlambatan belajar yang memiliki IQ antara 70-90 dan anak dengan berkebutuhan khusus yakni mereka yang memiliki IQ di bawah 70.
3. Kesulitan belajar spesifik: berkaitan dengan hambatan dalam prestasi akademik yang dimiliki individu.

b. Disabilitas fisik

1. Gangguan tubuh (tuna daksa): adalah individu yang mengalami gangguan gerak akibat kelainan pada sistem saraf atau struktur tulang, bisa disebabkan sejak lahir, karena penyakit atau akibat kecelakaan seperti polio dan kelumpuhan.

2. Gangguan penglihatan (tuna netra): adalah individu yang mengalami hambatan dalam melihat baik yang mengalami kebutaan total maupun yang memiliki penglihatan sangat terbatas (*low vision*).

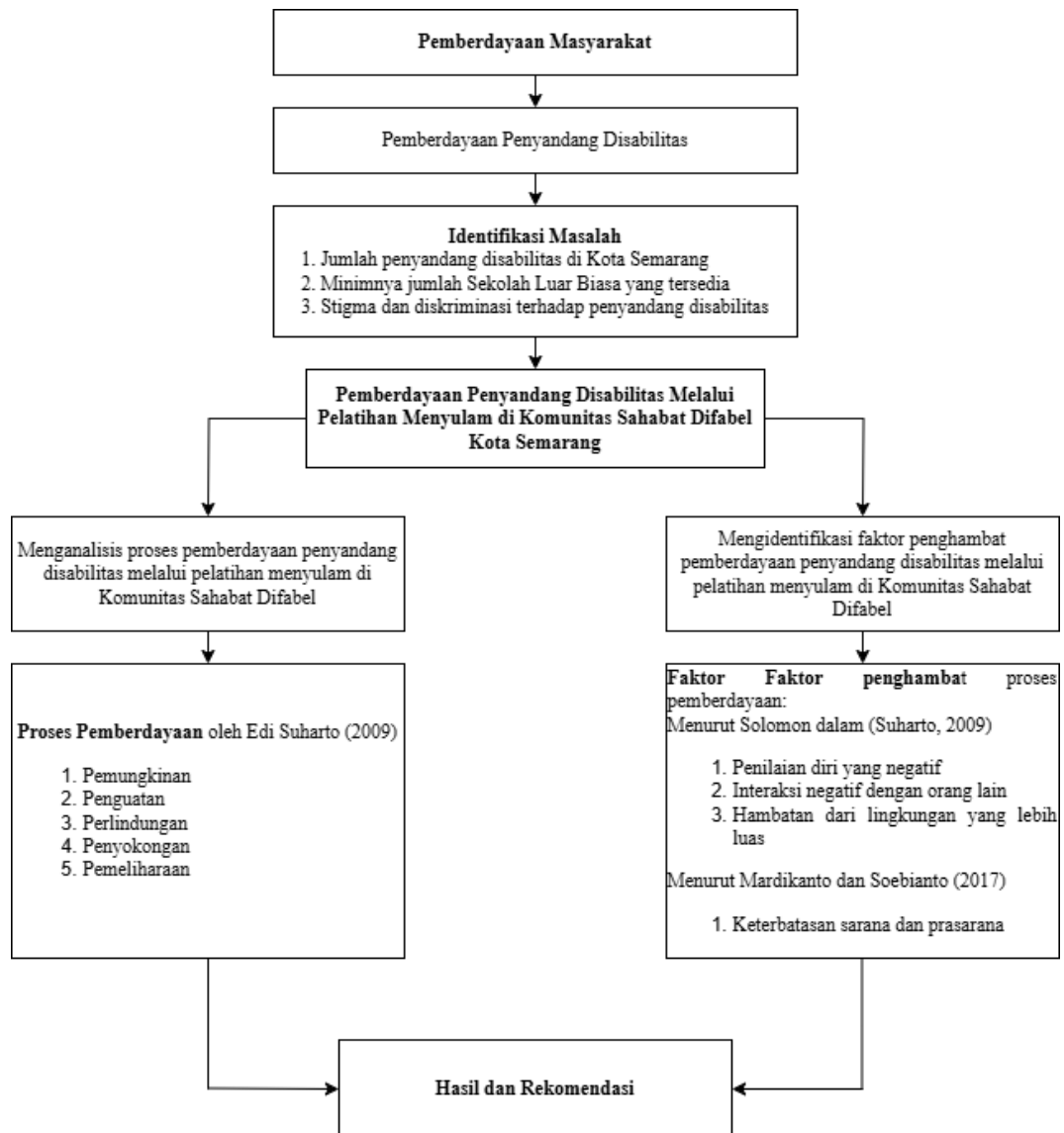
3. Gangguan pendengaran (tuna rungu): adalah individu yang kesulitan mendengar, baik secara permanen maupun sementara. Karena itu, mereka juga mengalami kesulitan berbicara sehingga sering juga disebut sebagai tuna wicara.

c. Disabilitas ganda (tuna ganda)

Adalah individu yang memiliki lebih dari satu jenis disabilitas, baik gabungan antara disabilitas fisik dan mental maupun kombinasi lainnya.

Informan utama yang menjadi subjek pemberdayaan dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas intelektual dan autisme. Keduanya merupakan bagian dari kelompok disabilitas yang memiliki karakteristik keterbatasan dalam fungsi kognitif, komunikasi, serta interaksi sosial. Disabilitas intelektual ditandai dengan kemampuan intelektual di bawah rata rata yang berdampak pada keterampilan adaptif sehari hari, seperti belajar, berkomunikasi dan bersosialisasi. Sementara itu autisme atau *autism spectrum disorder* (ASD) merupakan gangguan perkembangan neurologis yang mempengaruhi cara individu berinteraksi, berperilaku, dan memproses informasi.

1.7 Kerangka Pemikiran



1.8 Operasional Konsep

Definisi operasional merupakan uraian secara spesifik dan jelas mengenai suatu konsep atau variabel yang menjelaskan bagaimana konsep tersebut diukur, diamati atau diterapkan dalam suatu penelitian atau situasi tertentu.

1.8.1 Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Menurut Suharto (2009) pendekatan pemberdayaan mencakup lima aspek utama yang dikenal dengan istilah ‘5P’:

1. Pemungkinan: menciptakan lingkungan yang mendukung agar potensi masyarakat dapat berkembang secara maksimal. Pemberdayaan harus mampu menghilangkan hambatan kultural dan struktural yang menghalangi perkembangan mereka.
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan mereka. Pemberdayaan harus dapat menumbuhkan kemampuan dan rasa percaya diri masyarakat yang mendukung kemandirian mereka.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan, agar tidak menjadi korban penindasan oleh kelompok yang lebih kuat, menghindari persaingan yang tidak adil, dan mencegah eksploitasi oleh kelompok dominan. Pemberdayaan harus difokuskan pada penghapusan diskriminasi dan dominasi yang merugikan masyarakat kecil.
4. Penyokongan: memberikan arahan dan dukungan agar masyarakat dapat melaksanakan peran dan tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus dapat

membantu masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam kondisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5. Pemeliharaan: menjaga kondisi yang kondusif untuk memastikan tetap adanya keseimbangan dalam distribusi kekuasaan antar berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus memastikan keselarasan dan keseimbangan yang memberi kesempatan kepada setiap individu.

1.8.2 Faktor Faktor Penghambat Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Faktor faktor penghambat pemberdayaan menurut Solomon dalam (Suharto, 2009) meliputi:

1. Penilaian diri yang negatif: merupakan sikap merendahkan diri yang muncul sebagai akibat stereotip negatif yang diterima dari lingkungan sekitar. Contohnya, perempuan atau kelompok minoritas seringkali merasa tidak berdaya karena telah terbiasa dipandang sebagai pihak yang setara dalam struktur sosial.
2. Interaksi negatif dengan lingkungan: berasal dari pengalaman buruk yang dialami oleh individu tertindas dalam berinteraksi dengan sistem sosial yang menindas. Contohnya, perempuan atau kelompok minoritas sering mengalami perlakuan negatif dari lingkungan sosialnya. Pengalaman ini memunculkan rasa tidak berdaya seperti minder, merasa tidak mampu, atau merasa tidak pantas menjadi bagian dari organisasi tempat mereka berada.
3. Hambatan dari lingkungan yang lebih luas: bisa menjadi penghambat bagi kelompok tertentu dalam menjalankan peran dan tindakannya. Kondisi ini dapat

menyebabkan kelompok yang terpinggirkan merasa tidak memiliki kekuatan untuk mengekspresikan diri secara bebas.

Menurut Mardikanto dan Soebianto (2017), keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu hambatan dalam proses pemberdayaan. Ketersediaan aksesibilitas, mobilitas, dan fasilitas yang memadai sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan potensi masyarakat. Sarana dan prasarana berperan penting dalam mempermudah masyarakat mengakses berbagai sumber daya, memanfaatkan peluang yang ada, meningkatkan kapasitas diri, serta mencapai kesejahteraan secara berkelanjutan.

1.9 Fenomena Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena mengenai “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Pelatihan Menyulam di Komunitas Sahabat Difabel”. Studi ini didasarkan pada berbagai teori yang telah dijabarkan di kerangka teori meliputi, administrasi publik, paradigma administrasi publik, manajemen publik, pembangunan, manajemen pembangunan, administrasi pembangunan, konsep pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat serta teori mengenai penyandang disabilitas.

Penelitian ini menetapkan bahwa pendekatan yang digunakan adalah teori pemberdayaan dari Edi Suharto yang mencakup lima aspek utama: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Menurut Solomon dalam (Suharto, 2009), pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya kelompok rentan yang mengalami ketidakberdayaan akibat

faktor internal seperti penilaian diri yang negatif, maupun faktor eksternal seperti interaksi negatif dengan orang lain dan hambatan dari lingkungan yang lebih luas. Sedangkan Mardikanto dan Soebianto (2017) menyebutkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu hambatan dalam proses pemberdayaan. Saat ini, penyandang disabilitas masih sering menghadapi perlakuan diskriminatif, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas publik lainnya. Oleh karena itu, pemberdayaan penyandang disabilitas harus dijalankan secara terpadu dan melibatkan berbagai pihak secara bersama sama, demi satu tujuan bersama yaitu menyediakan peluang bagi mereka untuk berperan sesuai dengan potensi dan kebutuhan penyandang disabilitas.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena yang dialami oleh subjek penelitian melalui penggunaan bahasa dan ungkapan verbal. Pendekatan ini dirancang untuk menyajikan gambaran yang terperinci mengenai permasalahan penelitian serta menyusun data secara sistematis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang proses pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelatihan menyulam di Komunitas Sahabat Difabel Kota Semarang.

1.10.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi dimana kegiatan penelitian dilaksanakan. Dalam studi mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelatihan menyulam, lokasi penelitian difokuskan pada Komunitas Sahabat Difabel yang terletak di Kota Semarang.

1.10.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah keseluruhan pihak yang menjadi sumber informasi terkait permasalahan dalam studi ini. Penentuan subjek dilakukan berdasarkan tujuan dari penelitian mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas. Adapun subjek yang terlibat mencakup ketua Komunitas Sahabat Difabel, pelatih menyulam, penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas.

1.10.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang berfungsi untuk menganalisis suatu kondisi guna membantu peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan. Menurut Sugiyono (2014), data kualitatif dianggap lebih unggul karena mampu menyajikan gambaran objek penelitian secara mendalam dan rinci. Pemilihan data kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada kemampuan dalam menyampaikan informasi yang detail dari berbagai narasumber sebagai subjek penelitian. Data ini bisa berupa kata kata, skema, maupun gambar yang diperoleh melalui teknik observasi, diskusi, wawancara serta metode lainnya.

1.10.5 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2014) berdasarkan sumber data dalam penelitian diperoleh dari dua jenis yaitu:

1. Data primer

Data ini diperoleh secara langsung dari lapangan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari pihak pihak yang terlibat secara langsung seperti ketua Komunitas Sahabat Difabel yang menjalankan program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, data juga diperoleh dari penyandang disabilitas yang menjadi peserta dalam pelatihan menyulam.

2. Data sekunder

Data ini merupakan informasi yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya disajikan dalam bentuk tabel, grafik atau diagram. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui studi literatur seperti artikel, jurnal ilmiah, buku, serta sumber lain yang relevan dengan topik. Data sekunder yang digunakan mencakup artikel terkait pemberdayaan penyandang disabilitas, peraturan perundang undangan tentang disabilitas, data dari Pemerintah Kota Semarang dan data statistik mengenai jumlah penyandang disabilitas.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada serangkaian prosedur dan teknik yang diterapkan oleh peneliti guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang valid dan otentik.

1. Observasi

Menurut Widoyoko dalam Sugiyono (2014) observasi merupakan proses pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang diamati. Dalam penelitian

ini, peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi untuk menyaksikan secara langsung bagaimana proses pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelatihan menyulam dilakukan. Pendekatan yang digunakan adalah observasi partisipatif, dimana peneliti terlibat secara langsung dalam pengamatan aktivitas di Komunitas Sahabat Difabel.

2. Wawancara

Esterberg (dalam Sugiyono 2014) menyatakan bahwa wawancara adalah proses komunikasi dua arah yang bertujuan untuk saling bertukar informasi, ide serta pandangan guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai suatu topik. Dalam penelitian ini, teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) digunakan untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelatihan menyulam serta berbagai faktor yang menghambat proses pemberdayaan. Wawancara dilakukan terhadap pihak yang terlibat langsung dalam program yaitu ketua komunitas, pelatih menyulam dan para penyandang disabilitas. Supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan maka diperlukan alat alat seperti buku catatan, *tape recorder* dan *camera*.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014) dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan penggunaan berbagai bentuk dokumen seperti tulisan, angka, gambar, arsip atau laporan yang dapat digunakan sebagai bukti dan pendukung penelitian. Dalam konteks ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan

foto dan video kegiatan yang berkaitan dengan program pemberdayaan penyandang disabilitas.

4. Studi kepustakaan

Zed (2008) menjelaskan bahwa studi pustaka adalah rangkaian kegiatan yang melibatkan pencarian data dari berbagai sumber literatur seperti buku, artikel dan jurnal. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan terkait tema penelitian, khususnya yang berkaitan dengan isu disabilitas dan program pemberdayaan.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Milles dan Hubberman dalam Sugiyono (2014) analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus dan interaktif hingga prosesnya selesai. Dalam pandangan Milles dan Hubberman terdapat beberapa tahapan dalam analisis data yakni:

1. Reduksi data

Adalah proses untuk menyederhanakan data melalui rangkuman, pemilihan informasi yang penting, dan fokus pada hal-hal yang relevan. Proses ini juga mencakup pencarian tema dan pola, sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih terstruktur dan memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan serta analisis data lebih lanjut.

2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai format, seperti narasi ringkas, bagan alir (*flowchart*), hingga pengelompokan berdasarkan

kategori tertentu. Namun, penyajian yang paling umum digunakan adalah dalam bentuk uraian naratif yang menjelaskan temuan secara deskriptif.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir adalah menyusun kesimpulan. Proses ini sudah dimulai sejak tahap awal pengumpulan data dan bertujuan untuk mengorganisasi data secara sistematis agar dapat menjawab pertanyaan atau fokus penelitian. Kesimpulan ini merangkum hasil utama dari analisis yang telah dilakukan selama penelitian berlangsung.

1.10.8 Kualitas Data

Uji validitas dalam penelitian umumnya digunakan untuk memastikan kebenaran serta keabsahan data yang diperoleh. Kualitas suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh instrumen yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini, digunakan metode triangulasi sebagai cara untuk menilai keakuratan data. Mengacu pada pendapat Sugiyono (2014), triangulasi merupakan teknik yang mengombinasikan berbagai metode dan sumber data guna memperoleh informasi yang lebih valid. Tujuan dari metode ini adalah membandingkan hasil wawancara dengan realitas di lapangan agar data yang dikumpulkan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Penelitian ini secara spesifik menerapkan triangulasi sumber yakni dengan mengumpulkan informasi dari beberapa narasumber yang relevan guna memastikan konsistensi dan kesesuaian data dengan keadaan di lokasi penelitian.